SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 103

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp/Fax. (022). 589 1580 Soreang 40911Kabupaten Bandung
Email : badankesbangpol@bandungkab.go.id Website : badankesbangpol@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : /KEP. /BAKESBANGPOL/I/2024
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2020 Nomor 1781) ;

14. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-203 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 19) ;

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembaran Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) ;

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 34) ;

23. Perubahan Bupati Nomor 92 Tahun 2024 Tanggal 1 Juli 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2025;

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rincian Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : Juli 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG

Drs. BAMBANG SUKMAWIJAYA.M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680921 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Bandung, (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Bandung, (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran

Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : /Kep Bakesbangpol/2024

Tentang

Pembentukan Tim Rencana Kerja Tahun 2025

Susunan Keanggotaan

Tim Rencana Kerja Badan Kesatuan Bnngsa Dan Politik

Kabupaten Bandung Tahun 2025

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Drs. BAMBANG SUKMAWIJAYA . M.Si	KEPALA BADAN
2	Ir.H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT	SEKRETARIS
3	SUDIRO,S.Sos,M.S.I	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
4	HOLID ABDULLAH, SH	Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Kerjasama Intelijen
5	ELANG NURMANSYAH,S.Hut.,M.AP	kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
6	IWAN RIDWAN,S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	ENI PURWANTINI, S.Sos, M.Si	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
8	SUMIATI,S.Sos	Analis Perencanaan Anggaran
9	GUNGUN GANJAR GUNADI, S.M.	Ahli Pertama - Perencana

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG

Drs. BAMBANG SUKMAWIJAYA.M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680921 199303 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

Daftar Tabel ii

KATA PENGANTAR..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I..... 2

PENDAHULUAN..... 2

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Mekanisme Penulisan 4

BAB II 5

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 5

2.2. Capaian Keberhasilan Program 5

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 15

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

BAB III 42

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 42

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 42

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah 44

3.3. Program dan Kegiatan 53

BAB IV..... 67

RANCANGAN AKHIR KERJADAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 67

RANCANGAN AKHIR KERJATAHUN 2025..... 67

BAB V PENUTUP..... 74

Daftar Tabel

Table 1-Realisasi Program Kegiatan 5
Table 2- Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 Kabupaten Bandung 10
Table 3-Tabel 2.2 (TC.30) 16
Table 4-T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Bandung (BIDANG/ JAJARAN SAMPING) 41
Table 5-Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 56

KATA PENGANTAR

Guna memenuhi ketentuan sebagaima diatur dalam permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rancangan Akhir Kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan untuk melakukan analisis kebutuhan tahun 2024 dan Rencana Kerja ini merupakan sebuah proses menuju perencanaan kerja yang konfrehensif guna menjalankan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan gnuna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026

Semoga Rancangan Akhir Kerja ini berguna bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dapat mendukung terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten bandung dan semoga pula apa yang direncanakan sesuai dengan realita yang ada dan mampu berkontribusi terhadap capaian target indikator Utama di Kabupa ten Bandung

Soreang. Juli 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

Drs. Bambang Sukmawijaya, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19680921 199303 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

Rancangan Akhir Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025 memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang berfungsi untuk memperoleh kepastian, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Di sisi lain Rancangan Akhir Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan kondisi, potensi, permasalahan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan indikasi daftar usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025, dalam rangka memecahkan/menyelesaikan permasalahan pembangunan yang di hadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik melalui sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten.

Penyusunan Rancangan Akhir Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025 merujuk pada Rancangan Akhir Kerja RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Hal itu karena RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD di dalam satu tahun rencana, dan merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai, dimana program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan bersifat indikatif sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang diserta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja BAKESBANGPOL Kabupaten Bandung dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Kabupaten Bandung harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaen Bandung Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Bakesbangpol Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Bakesbangpol Tahun 2025. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah:
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten BandungTahun 2016 No 27);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; dan

12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang RKPD 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung . Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung pada tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
2. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2025.

1.4. Mekanisme Penulisan

Memuat uraian pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 terdapat pelaksanaan 6 (enam) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 43.043.718.974,- (Empat Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 46.804.964.633,- (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), atau sebesar 91,96%.

2.2. Capaian Keberhasilan Program

Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2023 secara umum berhasil dengan rata-rata persentase capaian program 91,96%. Di bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung :

Table 1-Realisasi Program Kegiatan

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan	Target		Realisasi	%
		Kinerja	Anggaran	Anggaran	
1	2	5	6	8	1000.00%
4	Urusan Penunjang				
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik		46,804,964,633	43,043,718,974	91.96%

4.12.0.00.0.00.12.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		**46,804,964,633**	**43,043,718,974**	91.96%
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**46,804,964,633**	**43,043,718,974**	91.96%
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**26,000,000**	**25,999,800**	100.00%
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00%
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3,500,000	3,499,800	99.99%
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	100.00%
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2,000,000	2,000,000	100.00%
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	3,500,000	3,500,000	100.00%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00%
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00%
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**5,375,073,886**	**5,240,643,913**	97.50%
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5,360,073,886	5,225,643,913	97.49%
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00%
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	10,000,000	10,000,000	100.00%
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**10,000,000**	**9,995,000**	99.95%
8.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34 orang	10,000,000	9,995,000	99.95%
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**481,278,485**	**480,642,876**	99.87%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 jenis	272,295,900	271,782,400	99.81%
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	17,414,188	17,407,200	99.96%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	780 HOK	10,000,000	9,975,000	99.75%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14 buah	40,000,000	40,000,000	100.00%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	2,938,200	2,937,000	99.96%
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10 jenis	4,500		0.00%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264 HOK 190 HOK 454 HOK	138,625,697	138,541,276	99.94%

8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**333,749,900**	**314,327,870**	94.18%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 buah	5,000,000	4,997,200	99.94%
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	43,269,900	28,795,870	66.55%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 bulan	285,480,000	280,534,800	98.27%
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**252,000,000**	**247,996,078**	98.41%
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	102,000,000	98,311,904	96.38%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit	50,000,000	50,000,000	100.00%
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18 jenis	100,000,000	99,684,174	99.68%
	Jumlah 1		**6,478,102,271**	**6,319,605,537**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**1,041,537,915**	**1,021,293,075**	98.06%
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**1,041,537,915**	**1,021,293,075**	98.06%
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	120 orang; 50 orang; 45 orang; 65 orang	1,041,537,915	1,021,293,075	98.06%
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**24,204,072,220**	**23,932,101,632**	98.88%
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan**		**24,204,072,220**	**23,932,101,632**	98.88%
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	500 orang	24,178,072,220	23,908,551,632	98.89%
	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Politik , Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan	3 Laporan	26,000,000	23,550,000	90.58%
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		***9,403,875,302***	***6,449,321,530***	68.58%

8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		***9,403,875,302***	***6,449,321,530***	68.58%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	9,393,875,302	6,440,901,530	68.56%
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 laporan	10,000,000	8,420,000	84.20%
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		***150,000,000***	***147,436,000***	98.29%
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		***150,000,000***	***147,436,000***	98.29%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 orang; 100 orang; 80 orang: 160 orang; 100 orang	150,000,000	147,436,000	98.29%
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		***5,527,376,925***	***5,173,961,200***	93.61%
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		***5,527,376,925***	***4,159,857,600***	75.26%
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	300 orang; 32 laporan	890,746,000	839,002,600	94.19%
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen; 92 laporan	3,427,849,800	3,312,685,000	96.64%
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15 Laporan	8,235,000	8,170,000	99.21%
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	1,200,546,125	1,014,103,600	84.47%
	Jumlah 2		**40,326,862,362**	36,724,113,437	
	Jumlah Total		**46,804,964,633**	43,043,718,974	91.96%

Walaupun secara umum capaian Rancangan Akhir Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil namun masih ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dibayarkan Sesuai Dengan Tagihan Dari Penyedia Jasa
- Honorarium Forkopimda dibayarkan sesuai dengan kehadiran anggota Forkopimda pada kegiatan yang melibatkan anggota Forkopimda tersebut

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan capaian kinerjanya mencapai 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Kewenangan yang dilimpahkan (KDH), dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut terjadi dari adanya koordinasi dengan pihak terkait sehingga kegiatan melampaui target.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

   Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Capaian Kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatif terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kineja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

   Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

   a. Paktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
   b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
   c. Perubahan Kebijakan/Aturan.
   d. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan

Table 2- Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 Kabupaten Bandung

Kode Rek	Urusan Bidang/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun ini 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)					Target program dan kegiatan Rancangan Akhir Kerja SKPD 2024		Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra SKPD tahun 2024			
							Target Rancangan Akhir Kerja SKPD Tahun 2023		Realisasi Rancangan Akhir Kerja SKPD tahun2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		10=(10/4)	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik																
4.12.0.00.0.00.12.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Poin		70 Poin		71	poin	71	Poin	83,61%	71	Poin		Poin	53	%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Anggaran/ Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		Dokumen				Dokumen		Dokumen			Dokumen		Dokumen	4	%
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	20	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	99.60%	4	dokumen	12	dokumen	60.0 %	%
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	10	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	6	dokumen	60.0 %	%
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan yang diselesaikan tepat waktu	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60.0 %	%
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang diselesaikan tepat waktu	10	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	99.04%	1	dokumen	5	dokumen	50.0 %	%
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang diselesaikan tepat waktu	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60.0 %	%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60.0 %	%
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, Laptah, Rancangan Akhir Kerja, Renstra, Laporan Triwulan)	10	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	10	dokumen	14	dokumen	140.0%	%
8.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah																
8.01.01.2.01.09	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah																
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										91.79%						

8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	91.74%	12	bulan	12	Bulan	20.0%	%
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (Buku)	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%		dokumen	2	dokumen	40.0%	%
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang diselesaikan secara tepat waktu	10	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	99.73%	2	dokumen	6	dokumen	60.0%	%
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										99.93%						
8.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah ASN Badan Kesbangpol	170	orang	34	orang	21	orang	21	orang	99.93%	21	orang	76	Orang	44.7%	%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										99.84%						
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli	175	jenis	35	jenis	35	jenis	35	jenis	99.53%	35	jenis	105	Jenis	60.0%	%
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40	jenis	10	jenis	10	jenis	10	jenis	99.35%	8	jenis	28	Jenis	70.0%	%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1000	jenis	780	HOK	780	HOK	780	HOK	99.98%	250	jenis	1810	HOK	181.0%	%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggadaan	70	buah	14	buah	14	buah	14	buah	99.94%	14	jenis	42	Buah	60.0%	%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan	20	jenis	4	jenis	4	jenis	4	jenis	100%	4	dokumen	12	Jenis	60.0%	%
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan	60	jenis	10	jenis	10	jenis	10	jenis	100%	12	jenis	32	Jenis	53.3%	%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	2000	dokumen	454	HOIK	454	HOIK	454	HOIK	99.94%	12	dokumen	920	HOIK	46.0%	%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										74.78%						
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	2000	buah	400	buah	400	buah	400	buah	100%	400	dokumen	1200	Buah	60.0%	%
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Penyediaan jasa listrik, air, internet dan telepon	15	jenis	3	jenis	3	jenis	3	jenis	31.49%	3	dokumen	9	Jenis	60.0%	%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan bagi penyediaan tenaga pendukung teknis dan perkantoran	60	bulan	12	dokumen	14	bulan	12	bulan	86.90%	12	dokumen	36	Bulan	60.0%	%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										99.02%						
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		unit	9	unit	9	unit	9	unit	97.58%	3	unit	21	Unit		%
8.01.0.00.0.00.31.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		45									1	paket	1			

8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											35	orang	35			
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan jenis peralatan mesin lainnya	90	unit	18	unit	18	unit	18	unit	100%	18	unit	54	Unit	60.0 %	%
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	jenis	18	jenis	18	jenis	18	jenis	99.56%	1	unit	37	Jenis	3700.0 %	%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										96.42%						
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										96.42%						
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan; jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggalika; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan kesadaran bela negara di wilayah	2750	orang	280	orang	280	orang	280	orang	96.42%	4	orang	564	orang	20.5 %	%
8.01.0.00.0.00.31.00	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibra	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	35	orang		orang		orang		orang		35	orang				
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka		35	orang		orang		orang		orang		35	orang				
8.01.0.00.0.00.31.00	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	35	orang		orang		orang		orang		35	Orang				
8.01.0.00.0.00.31.00	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	35	orang		orang		orang		orang		35	Orang				
8.01.0.00.0.00.31.00	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	35	orang		orang		orang		orang		35	orang				
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										99.91%						

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan										99.91%						
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pesta demokrasi	1250	orang	500	orang	500	orang	500	orang	99.91%	250	orang	1250	Orang	100.0%	%
8.01.03.2. 01.5	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaopran di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaopran di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	15	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan		3	laporan	9	dokumen	60.0%	
8.01.0.00.0.00.31.00	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	35	orang	35	orang	35	orang	35	orang							
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN										96.71%						
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										96.71%						
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan	120	orang	300	orang	200	orang	300	orang	96.69%	24	orang	900	orang	750.0%	%

	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	15	laporan	3	lapor an	3	lapor an	3	lapor an	100%	3	dokumen	9	lapor an	60.0 %	%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA										99.08%						
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										99.08%						
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan daerah; jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragam; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan sosial budaya; jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan dan pemeberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	2000	orang	410	orang	410	orang	410	orang	99.08%	400	orang	1220	orang	61.0 %	%
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										95.66%						
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										95.66%						
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Laporan Kerawanan di wilayah Kabupaten Bandung; Jumlah laporan kerawaanan diwilayah	500	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	98.89%	100	orang	106	Dokumen	21.2 %	%

	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah																
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Kerawanan di wilayah Kabupaten Bandung; Jumlah laporan kerawaanan diwilayah	80	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	98.96%	15	orang	21	Dokumen	26.3 %	%
8.01.06.01.5	Pelaksana Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah	75	Dokumen								15	dokumen				
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA	60	Bulan	6	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	53.51%	12	dokumen	12	Bulan	20.0 %	%

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Berdasarkan Kedudukan Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung berada dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan melaksanakan kewajiban di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi , Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan , serta pelaksanaan koordinasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan

demokrasi , pemeliharaan ketahanan ekonom, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama , ras dan golongan lainnya , fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik nsosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokras, pemeliharaan ketahaan ekonomi, sosial dan budaya , pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku,ras , umat beragama dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinahn daerah kabupaten. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung.

Table 3-Tabel 2.2 (TC.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bandung

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP/IKM			71	72	73	73,10	71,05	72	73,05	73,10	
2	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik			95	96	97	97.05	95	96	97	97.05	
3	Prosentase Pengendalian Penanganan Potensi Kompilik			72,5	73	74	75.05	72,5	73	74	75.05	
4	Prosentase Fasilitasi Penangangan Potensi Konflik			72,05	72,06	72,09	72.12	72,05	72,06	76	72.12	
5	Cakpuan Informasi dari Jaringan Yang Diterima			1546	1900	2290	2295	1546	1900	2300	2295	

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan lembaga yang berfokus pada pembinaan persatuan, kesatuan, dan harmoni di masyarakat. Peran sangat penting dalam mendukung berbagai program nasional, terutama yang terkait dengan ketahanan ekonomi, stabilitas politik, hukum, dan keamanan.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki tugas untuk mengatasi perbedaan dan konflik di tengah masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan mempromosikan persatuan dan kesatuan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi. Mereka dapat bekerja sama dengan program nasional untuk mendorong inklusivitas ekonomi, distribusi yang adil, dan peluang kerja bagi semua lapisan masyarakat.

Memelihara stabilitas politik di tingkat lokal. Melalui program nasional, seperti dialog politik dan pemahaman bersama, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat membantu mencegah polarisasi politik yang berpotensi merusak stabilitas. Dengan memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok politik. Mereka berkontribusi pada pemeliharaan kerukunan dan stabilitas politik di daerah. membantu menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. juga berkolaborasi dengan instansi vertikal dalam deteksi konflik yang berpotensi merusak kondusifitas wilayah. Dengan memiliki peran penting dalam mendukung program SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Mereka dapat memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan bahwa pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara inklusif dan merata dalam pembinaan ideologi . Dengan membangun pemahaman bersama, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik membantu menciptakan generasi yang memiliki daya saing dan siap untuk berkontribusi pada pertumbuhan SDM yang berkelanjutan.

Dalam konteks program Ketahanan Ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki peran dalam mempromosikan persatuan dalam rangka mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Mereka dapat memfasilitasi dialog antara berbagai komunitas untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil menguntungkan semua lapisan masyarakat. Dengan mencegah dan mengatasi potensi konflik yang dapat merusak stabilitas ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang merata bagi semua warga negara.

Dalam rangka menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memainkan peran yang penting. Mereka dapat berpartisipasi dalam program yang mendorong dialog politik dan pemahaman antara berbagai kelompok politik. Upaya ini membantu mencegah polarisasi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik juga dapat terlibat dalam transformasi pelayanan publik dengan mempromosikan standar pelayanan yang adil dan merata untuk seluruh masyarakat.

Dengan berfokus pada nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan kerukunan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mendukung efektivitas program-program nasional yang berkontribusi pada ketahanan ekonomi, stabilitas politik, serta hukum dan keamanan. Melalui upaya kolaboratif dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik memainkan peran yang krusial dalam memastikan implementasi dan keberhasilan program nasional yang menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan harmonis.

Dukungan Program Program perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yang mendukung terhadap prioritas pembangunan kabupaten, provinsi dan prioritas nasional

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	
PN1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
		PP8	Gerakan membangun desa			
PN7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 4. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
		PP8	Gerakan membangun desa			

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung
						POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup			
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	
PN5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP4	Reformasi sistem perlindungan sosial	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	

2.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati No 34 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sekertaris

Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayananan kesekertariatan yang meliputi pengkoordinasiaan penyusunan program,pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pernyataan diatas Sekertaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan
b. Pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan badan
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekertariatan
d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan
e. Penyelenggaraan koordinasi, intrengrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat

Sekertariat, membawahi :

1) Perencana

Perencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Perencana menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusun rencana dan program kerja Badan, sesuai dengan hasil Forum PD, visi dan misi, rencana strategis Badan dan Daerah, rencana strategis Provinsi dan Nasional;
b) Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Jabatan Fungsional, untuk penyusunan dan penetapan Rancangan Akhir KerjaBadan ;.
c) Pelaksanaan koordinasi dengan subbagian umum dan kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi badan;

d) Penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rancangan Akhir KerjaTahunan (RKT), Rancangan Akhir KerjaAnggaran (RKA)/ Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Perjanjian Kinerja (PK), serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang telah ditentukan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggan serta administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan .
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan jabatan fungsional untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Badan .
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan , barang milik daerah/Aset, rumah tangga kedinasan dan administrasikepegawaian
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

3) Sub Bagian keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusun program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan

Dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan
b. Pelaksanaan koordinasi dengan subbagian dan jabatan fungsional, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan
c. Pelaksamaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan badan
d. Penelitian kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara dan Diketahui oleh PPTK;
e. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);

f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan; dan
g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

2. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Bangsa

Kepala bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa yang meliputi ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara serta ketahanan bangsa.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa dan Ketahanan Bangsa, meliputi Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Bela Negara, dan ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya .
b. Penyelenggaraan Rancangan Akhir Kerjabidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Subbidang Ketahanan Bangsa, Meliputi Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Bela Negara, dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa

- Analis Kebijakan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa, Lingkup Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Bela Negara, Analis Kebijakan sebagai PPTK atau Subkoordinator Dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:
  a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Bela Negara
  b. Penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Akhir KerjaBina Ideologi, Karakter Bangsa dan Bela Negara
  c. Penyusunan rencana dan program kerja Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Bela Negara, sesuai dengan hasil Forum PD, visi misi, rencana strategis Badan dan Daerah.
- Analis Kebijakan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa, Lingkup Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya , Analis Kebijakan sebagai

PPTK atau Subkoordinator Dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Akhir KerjaKetahanan Ekonomi dan Sosial Budaya
c. Penyusunan rencana dan program kerja Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Bela Negara, sesuai dengan hasil Forum PD, visi misi, rencana strategis Badan dan Daerah.

3. Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah

Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kewaspadaan dan kerjasama intelijen yang meliputi fasilitas penanganan konflik dan pengawasan lembaga/ Orang asing serta kerjasama intelijen.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kewaspadaan Daerah meliputi Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen dan Hubungan Antar Lembaga, dan Penanganan Konflik, Pemantauan Orang/ Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing
b. Penyelenggaraan Rancangan Akhir Kerjabidang Kewaspadaan Daerah, Meliputi Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen dan Hubungan Antar Lembaga, dan Penanganan Konflik, Pemantauan Orang/ Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing
c. Penyelenggaraan koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Kewaspadaan Daerah

Bidang Kewaspadaan dan kerjasama intelijen, membawahi :

a) Sub Bidang Fasilitas penanganan konflik dan pengawasan lembaga/ orang asing;
b) Sub Bidang Kerjasama Intelijen.

3.1. Analis Kebijakan pada Bidang Kewaspadaan Daerah, Lingkup Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intlijen dan Hubungan Antar Lembaga Dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intlijen dan Hubungan Antar Lembaga
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Akhir KerjaKewaspadaan Dini, Kerjasama Intlijen dan Hubungan Antar Lembaga

c. Penyusunan rencana dan program kerja Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intlijen dan Hubungan Antar Lembaga , sesuai dengan hasil Forum PD, visi misi, rencana strategis Badan dan Daerah

3.2 Analis Kebijakan pada Bidang Kewaspadaan Daerah, Lingkup Pemantauan Orang/ Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Penanganan Konflik, Pemantauan Orang/ Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Akhir KerjaPenanganan Konflik, Pemantauan Orang/ Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing
c. Penyusunan rencana dan program kerja Penanganan Konflik, Pemantauan Orang/ Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, sesuai dengan hasil Forum PD, visi misi, rencana strategis Badan dan Daerah

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas

Kepala Bidang Politik dalam negeri dan pembinaan Ormas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoodinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan ormas yang meliputi politik dalam negeri dan pembinaan ormas.

Dalam melaksanakan tugas pokok nya menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasioal bidang Politik dalam Negeri dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Meliputi Politik Dalam Negeri , dan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ;

b. Penyelenggaraan Rancangan Akhir Kerjabidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, meliputi Politik dalam Negeri dan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan capaian kinerja bidang politik dalam negeri dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik dalam negeri dan pembinaan ormas, membawahi :

a) Analis Kebijakan Lingkup Politik Dalam Negeri.

Lingkup Politik Dalam Negeri Dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Politik Dalam Negeri

b. Penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Akhir KerjaPolitik Dalam Negeri.
c. Penyusunan rencana dan program kerja Politik Dalam Negeri , sesuai dengan hasil Forum PD, visi misi, rencana strategis Badan dan Daerah

b) Analis Kebijakan Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Akhir KerjaPemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
c. Penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan hasil Forum PD, visi misi, rencana strategis Badan dan Daerah

- Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

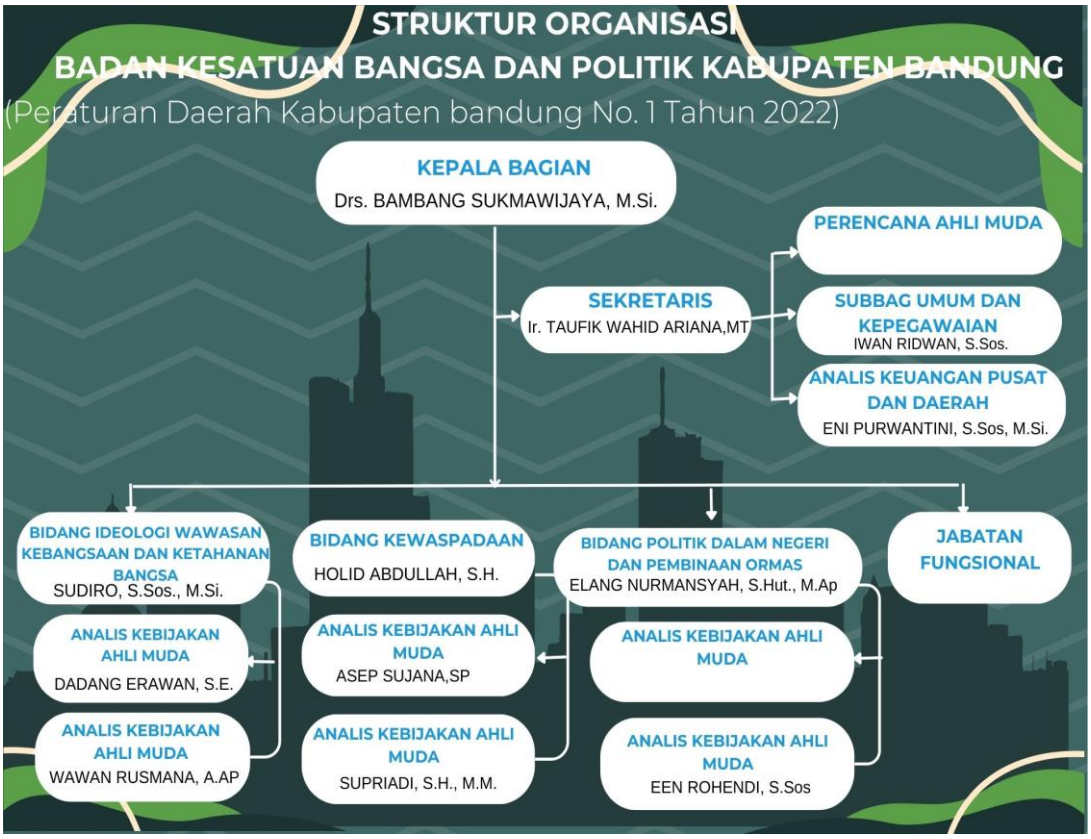
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sebanyak 28 dengan komposisi pegawai PNS 21 dan Non PNS 7 orang yang terdiri 22 laki-laki dan 6 orang perempuan. Jenis dan jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik komposisi pegawai berdasarkan eselonering terdiri dari :

Tabel Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	Presentase
		PNS	CPNS	THL		
1	SD	1	0	0	1	3,57%
2	SMP	0	0	0	0	0,00%
3	SMA	2	0	2	4	14,29%
4	D2	0	0	0	0	0,00%
5	D3	0	0	1	1	3.57%
6	D4	1	0	0	1	3.57%
7	S1	9	0	4	13	46,43%
8	S2	8	0	0	8	28,57%
	JUMLAH	**21**		**7**	**28**	

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kabupaten Bandung, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai berikut :



b. Sumber Daya Aparatur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 28 orang pegawai, terdiri dari 21 orang (PNS), 7 orang pegawai tidak tetap (Non Asn). Apabila dibandingkan dengan beban kerja, hasil analisis jabatan dan kebutuhan organisasi yang ada, perlu adanya kapasitas peningkatan SDM, baik melalui Pelatihan atau penambahan wawasan melalui pembinaan Aparatur terhadap pengetahuan Perundang – undangan maupun terhadap teknis pekerjaannya sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat menunjang terhadap Target Capaian. Keadaan personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung adalah sebagaimana berikut :

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan prakiraan capaian kinerja tahun berjalan (Tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi Rancangan

Akhir Kerja tahun 2025, dan realisasi Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagai mana tabel 2.1 (Tabel Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Kerja OPD sampai dengan tahun berjalan).

Sumber : Kepegawaian BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bulan Januari 2021

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 3.57 %, SMP sebesar 0 % SMA sebesar 14.29 %, S1 Sebesar 46.43 %dan S2 sebesar 28.57%. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai lembaga teknis daerah, secara pendidikan formal belum memadai, serta kapasitas sumber daya manusia terkait dengan perencanaan perlu ditingkatkan melalui diklat teknis perencana.

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2024

NO	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	Presentase
		PNS	CPNS		
1	Gol 1	0	0	0	0,00
2	Gol II	1	0	1	8,00%
3	Gol III	14	0	14	67,00%
4	Gol IV	6	0	6	25,00%
	JUMLAH	**21**		**21**	

Berdasarkan Tabel 2.2.di atas maka pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0 %, Golongan II sebanyak 08.00 %, Golongan III sebanyak 67.00 % dan Golongan IV sebanyak 25.00 %, melihat komposisi tersebut, pagawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik didominasi oleh golongan III, dilain sisi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung memerlukan tambahan pegawai Golongan III dan II untuk tenaga Perencana dan administrasi. Di samping pendidikan formal, pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Esselon
Tahun 2024

No.	Esselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pegawai yang mengikuti	%
1.	II b	0			
2.	III a	1 orang	III	1 orang	12.5%
3.	III b	1 orang	III	1 Orang	12.5%
4.	IV a	4 orang	IV	4 orang	50.0%
5.	IV b	2 orang	IV	2 orang	25.0%
	Jumlah	9 orang		9 orang	100%

Sumber : ***Kepegawaian BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKBulan Januari 2020***

Berdasarkan Tabel 2.2.di atas maka pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0 %, Golongan II sebanyak 26.32 %, Golongan III sebanyak 63.16 % dan Golongan IV sebanyak 10.53 %, melihat komposisi tersebut, pagawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik didominasi oleh golongan III, dilain sisi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memerlukan tambahan pegawai Golongan III dan II untuk tenaga Perencana dan administrasi.

- Isu Penting Penyelenggaran Tugas Pokok

  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung secara keseluruhan telah melakukan pelayanan untuk mencapai kinerja yang telah di targetkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Mentri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

  Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung menunjukan intensitas pelaksanaan tugas dimasa yang datang akan semakin meningkat, hal ini dilihat dari kondisi tantangan jaman yang menuntut

kemampuan menganalisa situasi yang terjadi dan juga menguasai di bidang tehknologi.Dilihat dari perkembangannya yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan sesuai dengan kondisi yang tersedia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung perlu diperbaharui sesuai dengan dinamika dan tuntutan perubahan dibidang kesatuan bangsa dan politik. Berikut tantangan yang mempengaruhi kinerja layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bandung menjadi penting untuk merumuskan isu strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bandung.

Adapun tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan jaman mengarahkan terhadap situasi globalisasi dimana arus informasi, mendorong perubahan yang sangat cepat mempengaruhi masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan mudah merebaknya disintegrasi bangsa.
b. Perkembangan ilmu dan tekhnologi yang cepat memudahkan untuk proses penyelesaian pekerjaan sehingga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan terhadap publik.
c. Teknologi memudahkan orang untuk mendapatkan informasi dan apabila arus informasi tidak diimbangi dengan kemampuan ilmu pengetahuan memudahkan untuk di propokasi. Semakin kompleksnya kehidupan seiring dinamika masyarakat, dan masyarakat itu sendiri ada yang memilikin sikap mengutamakan kelompoknya sehingga timbullah primordialisme dan nepotisme dimasyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus, mengikuti perkembangan tuntutan situasi yang mengarahkan untuk dibentuknya smart city 6. Daya dukung Organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung terhadap visi, misi kepala daerah, dilaksnakan dengan mengadakan deklarasi seluruh Ormas yang ada diwilayah Kabupaten Bandung harus dilakukan secara kontinyu sebagai cara perwujudan bahwa kegiatan ormas terkendali dan tidak bersebrangan dengan pemerintah setempat. Tantangan tersebut diatas, ada peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bandung.

1. Sinergitas Pemerintah Daerah dengan TNI, Polri, Kejari, Kemenag yang semuanya berposisi wilayah Kabupaten Bandung terutama melalui Forkopimda untuk mewujudkan kabupaten yang kondusif dalam melakukan pembangunan.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat diiringi dengan program smart city dengan leading sectornya adalah DISKOMINFO.
3. Setiap kegiatan yang dilakukan Ormas yang ada diwilayah Kabupaten Bandung, selalu melibatkam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam setiap even kegiatan
4. Tingkat pendidikan yang meningkat diwilayah Kabupaten Bandung
5. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memenui undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung yang memadai untuk menunjang kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Tim Penyusun Rancangan Akhir Kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Membandingkan Rancangan Akhir KerjaRKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rancangan Akhir Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Melakukan koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya mengacu pada Rancangan Akhir Kerja RKPD Tahun 2025 dan melakukan penelaahan terhadap permasalahan yang dihadapi di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang akan diselesaikan melalui program/kegiatan/sub kegiatan hasil penelahaan.

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan.

Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kesbangpol Tahun 2025 Kabupaten Bandung

Kode Rekening						Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai sakip**		**6.133.941.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bandung	**Nilai sakip**	**71,20**	**7,934,389,451.00**	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2,01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Evaluasi Kinerja Perangkat**		**Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**		**26.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**		**28,000,000.00**	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan		5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah dokumen renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan	3 dokumen	3,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah penyusunanan Dokumen RKA		3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah penyusunanan Dokumen RKA	1 dokumen	3,500,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah penyusunan dokumen RKA perubahan	1 dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Bandung	Jumlah penyusunan dokumen RKA perubahan	1 dokumen	2,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah penyusunanan Dokumen DPA	2 dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah penyusunanan Dokumen DPA	2 dokumen	2,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah penyusunan dokumen DPA perubahan	1 dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah penyusunan dokumen DPA perubahan	1 dokumen	3,500,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	1 dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	1 dokumen	5,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi renstra dan Rancangan	10 dokumen	5.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah dokumen evaluasi renstra dan	10 dokumen	5,000,000.00	

								Akhir Kerja yang diselesaikan secara tepat waktu					Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan secara tepat waktu				
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	1	2.0 1	8	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah				-					2,000,000.00		
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	1	2.0 1	8	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah				-					2,000,000.00		
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**1**	**2,0 2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah**		**5.480.561.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah**		**6,029,009,451.0 0**		
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran gaji pegawai	10 bulan	5.470.561.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Pembayaran gaji pegawai	10 bulan	6,019,009,451.0 0		
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	1	2,0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di penuhi	1 dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di penuhi	1 dokumen	5,000,000.00		
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	1	2,0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	2 dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	2 dokumen	5,000,000.00		
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**1**	**2,0 5**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah**		**5.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah**		**5,000,000.00**		
	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	1	2,0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah ASN Kesbangpol	21 orang	3.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	jumlah ASN Kesbangpol	21 orang	3,000,000.00		
		8.01.000.0 00.31.00	1	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		Jumlah ASN Kesbangpol	**21**	2.000.000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		Jumlah ASN Kesbangpol	**21**	2,000,000.00		
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**1**	**2,0 6**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya operasional perkantoran**		**92.500.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bandung**			**342,500,000.00**		

													Tersedianya operasional perkantoran				
	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	35 jenis	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	35 jenis	10,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	8 Jenis	2.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	8 Jenis	2,500,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	250 OK	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	250 OK	10,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	14 buah	5.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	14 buah	5,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bahan bacaan yang dibeli	4 jenis	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	jumlah bahan bacaan yang dibeli	4 jenis	5,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah penyediaan alat kebersihan	12 jenis	10.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bandung	Jumlah penyediaan alat kebersihan	12 jenis	10,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	12 Laporan	50.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	12 Laporan	300,000,000.00	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya operasional perkantoran**		**327.880.000,00**	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bandung**	**Tersedianya operasional perkantoran**		**1,327,880,000.00**	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	400 buah	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	400 buah	5,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	3 jenis	80.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	3 jenis	80,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor		jumlah tersedianya tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun	12 bulan	242.880.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	jumlah tersedianya tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun	12 bulan	1,242,880,000.00	

8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**1**	**2,0 9**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya operasional perkantoran**		202.000.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bandung	**Tersedianya operasional perkantoran**		**202,000,000.00**	
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	1	2,0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	9 uniit	102.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	9 uniit	102,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	1	2,0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan jenis peralatan mesin lainnya	18 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah pemeliharaan jenis peralatan mesin lainnya	18 unit	50,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	1	2,0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	50,000,000.00	
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**		**250.000.000,00**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kab. Bandung	**Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**70%**	**250,000,000.00**	
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**2**	**2,0 1**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**250.000.000,00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Kab. Bandung			**250,000,000.00**	
	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	2	2,0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan		250.000.000.00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Kab. Bandung	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan jumlah peserta yang mengikuti	50 orang 250 orang 250 orang 50 orang 50 orang	52,000,000.00	

						Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggal ika Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan kesadaran bela negara			Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		kegiatan ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggal ika Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan kesadaran bela negara			
8		8.01.02.2.01.0007				Pembinaan terhadap aktivtas kepaskibraan dan purnapaskibra		Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra	35 Orang	0,00	Pembinaan terhadap aktivtas kepaskibraan dan purnapaskibra	Kab. bandung	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibra		23,000,000.00	
8		8.01.02.2.01.0008				Pembentukan Paskibra		Jumlah Paskibraka	35 Orang	0,00	Pembentukan Paskibra	Kab Bandung	Jumlah Paskibraka	35 Orang	65,000,000.00	
8		8.01.02.2.01.0009				Pembinaan Lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila		Terlaksananya pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	35 Orang	0	Pembinaan Lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila		Terlaksananya pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	35 Orang	23,000,000.00	
8		8.01.02.2.01.0010				Pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila		Terlaksananya penugasan purnapaskibraka duta pancasila	35 Orang	0,00	Pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila		Terlaksananya penugasan purnapaskibraka duta pancasila	35 Orang	42,000,000.00	
8		8.01.02.2.01.0011				Pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	35 Orang	0,00	Pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	35 Orang	45,000,000.00	
	1	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**3**	**0**	**0**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN**		**Prosentase fasilitasi peningkatan pendidikan politik**		**776.000.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN**	Kab. Bandung	**Prosentase fasilitasi peningkatan pendidikan politik**	**70%**	**6,945,176,000.00**	

						ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					**ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					
	1	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**3**	**2,01**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**776.000.000,00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Kab. Bandung			**6,945,176,000.00**	
	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik		750.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Bandung	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik	250 orang	6,911,176,000.00	
	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum		jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemerintahan umum/pemilihan umum	3 Laporan	26.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kab. Bandung	jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemerintahan	3 laporan	26,000,000.00	

						Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			
8	1	3	2	1	6	pelaksanaan Tugas Paskibraka									8,000,000.00	
	1	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**4**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Persentase pelaksanaan pengawasan aktivitas Organisasi kemasyarakatan**		**431.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kab. Bandung	**Persentase pelaksanaan pengawasan aktivitas Organisasi kemasyarakatan**	**70%**	**431,000,000.00**	
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**4**	**2,0 1**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**431.000.000,00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Kab. Bandung			**431,000,000.00**	
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	4	2,0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah pemberian hibah bagi organisasi kemasyrakatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan jumlah bantuan hibah keuangan organisasi kemasyarakatan		421.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung	Jumlah pemberian hibah bagi organisasi kemasyrakatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan jumlah bantuan hibah keuangan organisasi kemasyarakatan	24 organisasi 200 orang	421,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	4	2,0 1	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah		10.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bandung	jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	3 laporan	10,000,000.00	
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**5**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN**		**Prosentase fasilitasi pengawasan ketahanan ekonomi**		**150.000.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN**	Kab. Bandung	**Prosentase fasilitasi pengawasan ketahanan ekonomi**	**70%**	**150,000,000.00**	

						EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					**EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**5**	**2,0 1**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**150.000.000,00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Kab. Bandung			**150.000.000,00**	
8	1	8.01.0.00.0 .00.31.00	5	2,0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	2000 Orang	150.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bandung	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	2000 Orang	150.000.000,00	
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**6**	**0**	**0**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Persentase Fasilitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial**		**1.652.840.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kab. Bandung	**Persentase Fasilitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial**	**70%**	**4,658,235,000.0 0**	
8	**1**	**8.01.0.00.0 .00.31.00**	**6**	**2,0 1**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**1.652.840.000,00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan**	Kab. Bandung			**4,658,235,000.0 0**	

											Penanganan Konflik Sosial					
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		jumlah anggota Tim Wasda yang mengikuti perlatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat	100 Orang	719.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung	jumlah anggota Tim Wasda yang mengikuti perlatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat	100 orang	2,900,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		jumlah kerawanan di wilayah kabupaten bandung	15 dokumen	250.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung	jumlah kerawanan di wilayah kabupaten bandung	15 dokumen	250,000,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan Antar Negara, Kewaspadaan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah	15 dokumen	8.235.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan Antar Negara, Kewaspadaan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bandung	jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah	15 dokumen	8,235,000.00	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2,01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA	12 bulan	675.605.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA	12 bulan	1,500,000,000.00	

8						**Jumlah**				**9.403.781.000,00**	**Jumlah**				**20,368,800,451.00**	

2.1 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah yang dilakukan oleh Kepala Badan/Sekretaris yang sumber datanya berasal dari Bidang secara tekhnis terkait dengan Rancangan Akhir Kerja yang akan disempurnakan untuk Tahun 2025 dengan nara sumber dapat dari Pusat/Propinsi/Bappeda dengan menghadirkan Perangkat dan pihak-pihak yang terkait dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk diminta saran dan masukannya antara lain dari BNNP, FKUB, FPK, FKDM, Ormas, Forkopimda, Sekretariat Daerah dan OPD yang terkait dengan terlaksananya tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dan seluruh pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait langsung dengan kegiatan tersebut.

Hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Rancangan Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Akhir Kerja PD) berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dan kerangka Anggaran Perangkat Daerah, Prioritas kegiatan yang sudah dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Propinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Rancangan Akhir Kerja PD disusun sesuai kebutuhan.

Table 4-T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Bandung (BIDANG/ JAJARAN SAMPING)

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sangat strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan pembinaan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi vertikal ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Dukungan Program Program perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yang mendukung terhadap prioritas pembangunan kabupaten, provinsi dan prioritas nasional

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	
PN1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung
	berkualitas dan berkeadilan	PP8	Gerakan membangun desa			
PN7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 9. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 10. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		PP8	Gerakan membangun desa			
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan	
		PP10	Pengembangan infrastruktur			

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung
			konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup		mengantisipasi risiko perubahan iklim	
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	
PN5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP4	Reformasi sistem perlindungan sosial	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

3.2.1. Tujuan

Tujuan, sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, harus mendukung visi dan misi Kepala Daerah yang baru. Maka dengan itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki perencanaan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemahaman dan pendewasaan berpolitik masyarakat yang sehat dan demokratis;
2. Mewujudkan dan memantapkan stabilitas `daerah yang aman dan tentram demi terselenggranya dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Penjelasan dari masing-masing hal tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1) Mewujudkan pemahaman dan pendewasaan berpolitik masyarakat yang sehat dan demokratis, mengandung makna yaitu :
   a. Pengembangan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, lebih demokratis dan terbuka disamping mengembangkan pola kehidupan kepartaian yang lebih menghormati beberapa aspirasi politik dan sistem.
   b. Penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis.
   c. Kemandirian Partai Politik dan lebih berfungsinya ormas, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.
   d. Infra dan Supra Struktur Politik, diharapkan akan senantiasa melaksanakan dan mengembangkan budaya politik yang demokratis serta menjungjung tinggi supremasi hukum dan HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
   e. Masyarakat, secara individu maupun lembaga diharapkan berorientasi dengan struktur dan kultur politik yang berlaku.

2) Mewujudkan dan memantapkan stabilitas daerah yang aman dan tentram demi terselenggranya dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung, mengandung makna :
   a. Memulihkan situasi dan kondisi yang lebih tentram, dengan menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.
   b. Menumbuh kembangkan semangat dan peran serta masyarakat untuk ikut serta mempertahankan dan memelihara stabilitas daerah dan stabilitas politik serta mempererat persatuan dan kesatuan.
   c. Memperkokoh integrasi bangsa dengan sikap dan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongroyongan disamping mengantisipasi potensi yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa maupun konflik daerah.Sesuai program dan kegiatan yang terakomodasi dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, untuk Tahun Anggaran 2024 akan direncanakan 6 (enam) program dan kegiatan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.

3.2.1.1 Prioritas pembangunan 2025

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Renstra dan Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah;
      - Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran
   - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

c. Administrasi Umum
   - Penyediaan jasa surat menyurat
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Penyediaan jasa kebersihan kantor
   - Penyediaan alat tulis kantor
   - Barang cetakan dan penggandaan
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan peralatan rumah tangga
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Penyediaan makan dan minuman
   - Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   - Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2. Program Penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

   Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

   - Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan
   - Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang idiologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik

   Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi mpolitik di daerah;

   - Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah ;

4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sosialisasi Undang-undang Ormas

- Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya

Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rancangan Akhir Kerjasebagai penjabaran dari Rencana Strategis. Adapun Sasaran Rancangan Akhir Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Meningkatnya cakupan penanganan konflik sosial.

Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Menciptakan Stabilitas Lingkungan Bermasyarakat yang Religius dan Kondusif	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BAKESBANGPOL	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai sakip**			
	Terlaksanaanya **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**		
	Terlaksanaanya	Tersusunnya	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah renstra dan Renja yang diselesaikan	
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Terlaksanaanya Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD			Jumlah penyusunanan RKA	
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Terlaksanaanya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD			Jumlah penyusunan RKA perubahan	
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksanaanya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah penyusunanan DPA	
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksanaanya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah penyusunan DPA perubahan	
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanaanya Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	
	Terlaksanaanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah evaluasi renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu	
	Terlaksanaanya Peng administrasian Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya keuangan perangkat daerah**		
	Terlaksanaanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Pembayaran gaji pegawai	
	SKPD Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksanaanya Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah keuangan akhir tahun yang di penuhi	
	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Keuangan an/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksanaanya Koordinasi dan Penyusunan Keuangan an/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan an/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah rekonsiliasi keuangan an yang diselesaikan secara tepat waktu	
	Terlaksanaanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah**		
	Terlaksanaanya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			jumlah ASN Kesbangpol	
	Terlaksanaanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya operasional perkantoran**		
	Terlaksanaanya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	
	Terlaksanaanya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	
	Terlaksanaanya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			jumlah yang mendapatkan makanan dan minuman	

	Terlaksanaanya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	
	Terlaksanaanya	Tersusunnya	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			jumlah bahan bacaan yang dibeli	
	Terlaksanaanya Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah penyediaan alat kebersihan	
	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	
	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya operasional perkantoran**		
	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	
	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	
	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			jumlah tersedianya tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun	
	Terlaksanaanya **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terselenggaranya **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya operasional perkantoran**		
	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	
	Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah pemeliharaan peralatan mesin lainnya	
	Terlaksanaanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah kantor yang dipelihara	
		meningkatkan sinergitas peran serta aparatur dan masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terselenggaranya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggal ika Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan kesadaran bela negara	
	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibra			Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	

	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka		Pembentukan Paskibraka			Jumlah Paskibraka	
	Terlaksananya pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila		Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
	Terlaksananya penugasan purnapaskibraka duta pancasila		Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
	Terbentuknya purnapskibraka duta pancasila		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Prosentase fasilitasi peningkatan pendidikan politik**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Budaya Politik, Peningkatan Demrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
	Tersusunnya Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik	
	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pe di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pe di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pe di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pe di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemerintahan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	
	Terlaksananya penugasan paskibraka		Pelaksanaan Tugas Paskibraka			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	
		meningkatkan sinergitas peran serta aparatur dan masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase pelaksanaan pengawasan aktivitas kemasyarakatan**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
	Terlaksananya Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Terselenggaranya Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,			Jumlah pemberian hibah bagi kemasyrakatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	

	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orma s Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			pembinaan kemasyarakatan dan jumlah bantuan hibah keuangan kemasyarakatan	
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pe Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pe Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pe Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pe dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	
		meningkatkan sinergitas peran serta aparatur dan masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Prosentase fasilitasi pengawasan ketahanan ekonomi**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terselenggaranya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	
		meningkatkan sinergitas peran serta aparatur dan masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Fasilitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselenggaranya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			jumlah anggota Tim Wasda yang mengikuti perlatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselenggaranya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			jumlah kerawanan di wilayah kabupaten bandung	

	Pemantauan Asing, Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pe di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pe di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pe di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pe dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah	
	Terlaksananya kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA	

Tujuan, Sasaran dan Indilator Kinerja Utama Badan Kesbangpol
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	Target 2025
1	Menciptakan stabilitas lingkungan masyarakat yang religius dan kondusif	Meningkatkan sinergritas Peran Serta Aparatur dan Masyarakat dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Wilayah	Persentase Fasilitasi penanganan potensi Konflik	72,0%
2		Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Meningkatnya cakupan penanganan konflik sosial	Cakupan informasi dari jaringan yang di terima	1900 Poin
3		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BAKESBANGPOL	Nilai Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71 Poin
			Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik	96%

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung yang sampai saat penyusunan Rancangan Rancangan Akhir Kerjaini belum terumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bandung. Misi yang akan diemban perangkat daerah guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada permendagri 050-3708 2020 dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan

untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kepala Badan . Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan 6 Program, 7 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Kesesuaian Rencana Awal dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Rancangan Akhir Kerja belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel TC.33 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Kepala Badan beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Staf harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bandung

Rancangan Akhir Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025 berisi program/ kegiatan/sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi

perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Akhir Kerja-PD). Rancangan Akhir Kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya). Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 :

Table 5-Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	73	**Nilai sakip**		kab.bdg	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai sakip**		**8,664,382,375**	APBD			**74**	**7,934,389,451**
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	70	**Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**		kab.bdg	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**		**131,500,000**	APBD				**28,000,000**
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Jumlah dokumen renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab.bdg	Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3,000,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Jumlah penyusunanan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kab.bdg	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah penyusunanan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11,500,000	APBD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3,500,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Jumlah penyusunan dokumen RKA perubahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kab.bdg	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah penyusunan dokumen RKA perubahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000	APBD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
8	1	8.01.0.00.	1	2	4		2	Jumlah penyusunanan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil	kab.bdg			Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil	10,000,000	APBD		Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil	2 Dokumen	2,000,000

		0.00. 31.00				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunanan Dokumen DPA	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA				Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA		
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	Jumlah penyusunan dokumen DPA perubahan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	kab.bdg	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA perubahan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	10,000,000	APBD		Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	3,500,000
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil LKIP PD	kab.bdg	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil LKIP PD	40,000,000	APBD		Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil LKIP PD	1 Dokumen	5,000,000
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Jumlah dokumen evaluasi renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan secara tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan secara tepat waktu	kab.bdg	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan secara tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan secara tepat waktu	30,000,000	APBD		Jumlah dokumen evaluasi renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan secara tepat waktu	10 dokumen	5,000,000
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2	8	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah								-					2,000,000
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2	9	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah								-					2,000,000
8	**1**	**8.01. 0.00. 0.00. 31.00**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah**		kab.bdg	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah**		**6,061,938,100**	APBD				**6,029,009,451**
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Jumlah Pembayaran gaji pegawai	Jumlah Dokumen Pembayaran dan Gaji yang difasilitasi	kab.bdg	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji pegawai	Jumlah Dokumen Pembayaran dan Gaji yang difasilitasi	5,996,938,100	APBD		Jumlah Dokumen Pembayaran dan Gaji yang difasilitasi	10	6,019,009,451
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di penuhi	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	kab.bdg	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di penuhi	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	35,000,000	APBD		Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	5,000,000
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	kab.bdg	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan	30,000,000	APBD		Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	5,000,000

					Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		diselesaikan secara tepat waktu	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		
8	**1**	**8.01. 0.00. 0.00. 31.00**	**1**	**2 , 1**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah**		kab.bdg	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah**		**85,000,000**	APBD				**5,000,000**
		8.01. 01.2. 05.00 02				Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kab Bandung	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45,000,000	APBD		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		3,000,000
		8.01. 01.2. 05.00 10				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	Jumlah orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Kab. bandung	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40,000,000			Jumlah orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		2,000,000
8	**1**	**8.01. 0.00. 0.00. 31.00**	**1**	**2 , 1**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya operasional perkantoran**		kab.bdg	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya operasional perkantoran**		**1,234,224,275**	APBD				**342,500,000**
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2 , 1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah Laporan dan Fasilitasi Penyediaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	kab.bdg	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah Laporan dan Fasilitasi Penyediaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	400,600,600	APBD		Jumlah Laporan dan Fasilitasi Penyediaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	35 Jenis	10,000,000
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2 , 1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah Laporan dan Fasilitasi Penyediaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	kab.bdg	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah Laporan dan Fasilitasi Penyediaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	312,700,000	APBD		Jumlah Laporan dan Fasilitasi Penyediaan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	8 jenis	2,500,000
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2 , 1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	780	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	Jumlah Laporan dan Fasilitasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab.bdg	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	Jumlah Laporan dan Fasilitasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,000,000	APBD		Jumlah Laporan dan Fasilitasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250 ok	10,000,000
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2 , 1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	Jumlah Laporan dan satuan barang yang dicetak dan digandakan	kab.bdg	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	Jumlah Laporan dan satuan barang yang dicetak dan digandakan	95,923,675	APBD		Jumlah Laporan dan satuan barang yang dicetak dan digandakan	14 buah	5,000,000
8	1	8.01. 0.00. 0.00. 31.00	1	2 , 1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	jumlah bahan bacaan yang dibeli	Jumlah Laporan dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	kab.bdg	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibeli	Jumlah Laporan dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	20,000,000	APBD		Jumlah Laporan dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	4 jenis	5,000,000

8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	7	Penyediaan Bahan/Material	10	Jumlah penyediaan alat kebersihan	Jumlah Fasilitasi dan Jenis penyediaan alat kebersihan	kab.bdg	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan alat kebersihan	Jumlah Fasilitasi dan Jenis penyediaan alat kebersihan	10,000,000	APBD		Jumlah Fasilitasi dan Jenis penyediaan alat kebersihan	12 jenis	10,000,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	454	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan rapat dan Konsultasi SKPD	kab.bdg	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan rapat dan Konsultasi SKPD	325,000,000	APBD		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan rapat dan Konsultasi SKPD	400 hok	300,000,000
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya operasional perkantoran**		kab.bdg	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya operasional perkantoran**		**619,720,000**	APBD				**1,327,880,000**
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	Jumlah dokumen penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	kab.bdg	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	Jumlah dokumen penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	20,000,000	APBD		Jumlah dokumen penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	400 buah	5,000,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah dokumen fasilitasi pembayaran jasa layanan komunikasi air dan listrik	kab.bdg	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah dokumen fasilitasi pembayaran jasa layanan komunikasi air dan listrik	80,000,000	APBD		Jumlah dokumen fasilitasi pembayaran jasa layanan komunikasi air dan listrik	3 Jenis	80,000,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	jumlah tersedianya tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun	Jumlah laporan dan fasilitasi pendukung administrasi selama 1 tahun	kab.bdg	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tersedianya tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun	Jumlah laporan dan fasilitasi pendukung administrasi selama 1 tahun	519,720,000	APBD		Jumlah laporan dan fasilitasi pendukung administrasi selama 1 tahun	12 bulan	1,242,880,000
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya operasional perkantoran**		kab.bdg	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya operasional perkantoran**		**532,000,000**	APBD				**202,000,000**
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan mobil jabatan dan Jumlah Mobil jabatan	kab.bdg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan mobil jabatan dan Jumlah Mobil jabatan	122,000,000	APBD		Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan mobil jabatan dan Jumlah Mobil jabatan	9 unit	102,000,000

8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18	Jumlah pemeliharaan jenis peralatan mesin lainnya	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	kab.bdg	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan jenis peralatan mesin lainnya	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	70,000,000	APBD		Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	18 jenis	50,000,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	kab.bdg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	340,000,000	APBD		Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 gedung	50,000,000
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**												**8,664,382,375**	APBD				**7,934,389,451**
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**2,925,000,000**	APBD				**250,000,000**
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**2**	**0**	**0**										APBD			**70%**	**250,000,000**
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**2**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**					**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**2,925,000,000**	APBD			**70%**	**250,000,000**
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	280	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan; jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan jumlah orang yang mengikuti kegiatan ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	kab.bdg	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan; jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggalika; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan kesadaran bela negara di wilayah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan jumlah orang yang mengikuti kegiatan ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan Jumlah orang yang mengikuti	1,590,000,000	APBD		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan jumlah orang yang mengikuti kegiatan ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		52,000,000

								penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggalika; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan kesadaran bela negara di wilayah	jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggal ika Jumlah orang yang mengikuti pendidikan kesadaran bela negara				kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggal ika Jumlah orang yang mengikuti pendidikan kesadaran bela negara				jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggal ika Jumlah orang yang mengikuti pendidikan kesadaran bela negara		
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibra			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibra									23,000,000
8	1	8.01.02.2.01.00 08	3	2	8	Pembentukan Paskibra			Jumlah Paskibraka		Pembentukan Paskibra		Jumlah Paskibraka	1,335,000,000			Jumlah Paskibraka		65,000,000	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	9	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						23,000,000	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	10	Pelaksnaan Tugas Purnapskibraka Duta Pancasila			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Pelaksnaan Tugas Purnapskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						42,000,000	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila			Jumlah Purnapskibraka Duta Pancasila		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapskibraka Duta Pancasila						45000000	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**3**	**0**	**0**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				kab.bdg	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**111,909,648,900**	APBD			50 orang, 250 orang, 250 orang, 50 orang, 50 orang	**6,945,176,000**	

8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**3**	**0**	**0**					kab.bdg					APBD			**70%**	**6,945,176,000**
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**3**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				kab.bdg	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			**111,909,648,900**	APBD			**70%**	**6,945,176,000**
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pesta demokrasi	jumlah orang yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik	kab.bdg	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pesta demokrasi	jumlah orang yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik	111,790,202,900	APBD		jumlah orang yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik		6,911,176,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	500	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pesta demokrasi	jumlah orang yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik	kab.bdg	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pesta demokrasi	jumlah orang yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik	119,446,000	APBD		jumlah orang yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik	250 orang	26,000,000

						Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
8	1	3	2	1	6	Pelaksanaan Tugas Paskibraka			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		Pelaksanaan Tugas Paskibraka		Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka						8,000,000
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**4**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				kab.bdg	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**7,077,268,000**	APBD			3 laporan	**431,000,000**
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**4**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				kab.bdg	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**7,077,268,000**	APBD			**70%**	**431,000,000**
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	4	2	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah pemberian hibah bagi organisasi kemasyrakatan jumlah Orang yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan jumlah bantuan hibah keuangan organisasi kemasyarakatan	kab.bdg	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah pemberian hibah bagi organisasi kemasyrakatan jumlah Orang yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan jumlah bantuan hibah keuangan organisasi kemasyarakatan	7,006,482,000	APBD		Jumlah pemberian hibah bagi organisasi kemasyrakatan jumlah Orang yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan jumlah bantuan hibah keuangan organisasi kemasyarakatan		421,000,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	4	2	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3	jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengaw	Jumlah Dokumen/ Laporan monitoring dan evaluasiPendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Fasilitasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	kab.bdg	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan monitoring dan evaluasiPendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Fasilitasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	70,786,000	APBD		Jumlah Dokumen/ Laporan monitoring dan evaluasiPendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Fasilitasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	24 organisasi 200 orang	10,000,000

								asan ormas dan ormas asing di daerah											
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**5**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				kab.bdg	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**1,229,000,000**	APBD			3 laporan	**150,000,000**
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**5**	**0**	**0**					kab.bdg					APBD			**70%**	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**5**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah Orang yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	kab.bdg	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah Orang yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	**1,229,000,000**	APBD		Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah Orang yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	**70%**	**150,000,000**
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	5	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	410			kab.bdg	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1,229,000,000	APBD				150,000,000
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**6**	**0**	**0**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**				kab.bdg	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**			**20,700,772,404**	APBD			100 orang, 100 orang, 200 orang,	**4,658,235,000**

						FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					**FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**							
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**6**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				kab.bdg	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			**20,700,772,404**	APBD			**65%**	**4,658,235,000**
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Kerawanan di wilayah Kabupaten Bandung; Jumlah laporan kerawaanan diwilayah	jumlah orang/ anggota Tim Wasda yang mengikuti perlatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat	kab.bdg	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Kerawanan di wilayah Kabupaten Bandung; Jumlah laporan kerawaanan diwilayah	jumlah orang/ anggota Tim Wasda yang mengikuti perlatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat	11,441,272,404	APBD		jumlah orang/ anggota Tim Wasda yang mengikuti perlatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat	100	2,900,000,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32	Jumlah Laporan Kerawanan di wilayah Kabupaten Bandung; Jumlah laporan kerawaanan diwilayah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Kerawanan di wilayah kabupaten bandung	kab.bdg	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Kerawanan di wilayah Kabupaten Bandung; Jumlah laporan kerawaanan diwilayah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Kerawanan di wilayah kabupaten bandung	7,709,500,000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Kerawanan di wilayah kabupaten bandung	15	250,000,000
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	32	Jumlah Laporan Kerawanan di wilayah Kabupaten Bandung; Jumlah laporan	jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen	kab.bdg	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Laporan Kerawanan di wilayah Kabupaten Bandung; Jumlah laporan kerawaanan diwilayah	jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang	50,000,000	APBD		jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen	15	8,235,000

						Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		kerawaanan diwilayah	pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah				pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah		
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	Jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah Laporan Hasil dan Fasilitasi FORKOPIMDA	kab.bdg	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA		1,500,000,000	APBD		Jumlah Laporan Hasil dan Fasilitasi FORKOPIMDA	12	1,500,000,000
Jumlah 2														**143,841,689,304**					**12,434,411,000**
Jumlah Total														**152,506,071,679**					**20,368,800,451**

BAB IV

RANCANGAN AKHIR KERJADAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RANCANGAN AKHIR KERJA TAHUN 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025					
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai sakip**	kab.bdg	**70%**	**9,970,923,240**	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	kab.bdg		**28,000,000**	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan	kab.bdg	4	3,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah penyusunanan Dokumen RKA	kab.bdg	2	3,500,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah penyusunan dokumen RKA perubahan	kab.bdg	1	2,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunanan Dokumen DPA	kab.bdg	2	2,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA perubahan	kab.bdg	1	3,500,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	kab.bdg	1	5,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renstra dan Rancangan Akhir Kerja yang diselesaikan secara tepat waktu	kab.bdg	10	5,000,000	APBD	

8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	8	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah				2,000,000		
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	9	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah				2,000,000		
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah**	kab.bdg		**7,965,543,240**	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji pegawai	kab.bdg	10	7,955,543,240	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di penuhi	kab.bdg	1	5,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	kab.bdg	2	5,000,000	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah**	kab.bdg		**55,000,000**	APBD	
		8.01.01.2.05.0002				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab.bdg	1	3,000,000	APBD	
		8.01.01.2.05.0010				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		35	52,000,000	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya operasional perkantoran**	kab.bdg		**392,500,000**	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	kab.bdg	35	60,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	kab.bdg	8	2,500,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	kab.bdg	250	10,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	kab.bdg	14	5,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibeli	kab.bdg	4	5,000,000	APBD	

8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan alat kebersihan	kab.bdg	12	10,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	kab.bdg	400	300,000,000	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya operasional perkantoran**	kab.bdg		**1,327,880,000**	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	kab.bdg	400	5,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	kab.bdg	3	80,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tersedianya tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun	kab.bdg	12	1,242,880,000	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**1**	**2,1**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya operasional perkantoran**	kab.bdg		**202,000,000**	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	kab.bdg	9	102,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan jenis peralatan mesin lainnya	kab.bdg	18	50,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	1	2,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kab.bdg	1	50,000,000	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		kab.bdg			APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	kab.bdg		**780,000,000**	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**2**	**0**	**0**		**Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	kab.bdg	**1**		APBD	

8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**2**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	kab.bdg	**2**	**780,000,000**	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan dalam penguatan pemahaman sejarah kebangsaan jumlah Orang yang mengikuti kegiatan ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan jumlah Orang yang mengikuti kegiatan pembauran kebangsaan Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan penanaman karakter bangsa dan bhineka tunggal ika Jumlah Orang yang mengikuti pendidikan kesadaran bela negara	kab.bdg	50, 250, 250, 50, 50	52,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibra	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			43,000,000		
8	1	8.01.02.2.01.0008	3	2	8	Pembentukan Paskibra	Jumlah Paskibraka			515,000,000		
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	9	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			43,000,000		
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	10	Pelaksnaan Tugas Purnapskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			62,000,000		
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapskibraka Duta Pancasila			65,000,000		
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**3**	**0**	**0**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Prosentase fasilitasi peningkatan pendidikan politik**	kab.bdg	**1**	**19,500,820,000**	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**3**	**0**	**0**		**Prosentase peningkatan pendidikan politik**	kab.bdg	**1**		APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**3**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		kab.bdg	**16**	**19,500,820,000**	APBD	

8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah orang yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan partai politik	kab.bdg	250	19,446,820,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	3	2	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemerintahan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	kab.bdg	3	26,000,000	APBD	
8	1	3	2	1	6	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka			28,000,000		
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**4**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase pelaksanaan pengawasan aktivitas Organisasi kemasyarakatan**	kab.bdg	**1**	**1,736,000,000**	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**4**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		kab.bdg	**12**	**1,736,000,000**	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	4	2	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pemberian hibah bagi organisasi kemasyrakatan jumlah Orang yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan jumlah bantuan hibah keuangan organisasi kemasyarakatan	kab.bdg	24, 200	1,726,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	4	2	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	kab.bdg	3	10,000,000	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**5**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Prosentase fasilitasi pengawasan ketahanan ekonomi**	kab.bdg	**1**	**350,000,000**	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**5**	**0**	**0**		**Prosentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan ketahanan sosial dan budaya**	kab.bdg	**1**		APBD	

8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**5**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		kab.bdg	**3**	**350,000,000**	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	5	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah Orang yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	kab.bdg	100, 100, 200	350,000,000	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**6**	**0**	**0**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Fasilitasi Kegiatan Penanganan Konflik Sosial**	kab.bdg	**1**	**10,799,235,000**	APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**6**	**0**	**0**		**Persentase penanganan konflik sosial**	kab.bdg	**1**		APBD	
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.31.00**	**6**	**2**	**0**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		kab.bdg	**11**	**10,799,235,000**	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah anggota Tim Wasda yang mengikuti perlatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat	kab.bdg	100	5,341,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah kerawanan di wilayah kabupaten bandung	kab.bdg	15	3,950,000,000	APBD	
8	1	8.01.0.00.0.00.31.00	6	2	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,	kab.bdg	15	8,235,000	APBD	

						Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah					
8	1	8.01.0.00.0.00.31 .00	6	2	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA	kab.bdg	12	1.500.000.000	APBD	
										43,136,978,240		

Anggaran pada tahun ini sebelum perubahan penambahan murni sebesar Rp. 20.368.800.451 dan dengan adanya penambahan anggaran menjadi Rp. 43.136.978.240 dengan begitu selisih penambahan sebesar Rp. 22.768.177.789

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun 2024 merupakan dokumen awal perencanaan tahunan yang berlandaskan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. disusun dengan berpedoman pada kebutuhan dan Pertimbangan lain berdasarkan pengalaman atau history pada tahun tahun 2024 dengan demikian ada keselarasan antara prioritas kabupaten dengan prioritas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maupun nasional. Rancangan Akhir Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2024.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai ujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

Soreang, Juli 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. BAMBANG SUKMAWIJAYA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19680921 199303 1 003

Form E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RANCANGAN AKHIR KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Rancangan Akhir Kerja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan Rancangan RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
9	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.	√			
10.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Forum PD		√	Tidak ada usulan Forum PD	
10 a.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10b.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
10c.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

Soreang, Juli 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. BAMBANG SUKMAWIJAYA, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19680921 199303 1 003